
**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NELAYAN****(Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)****Oleh****Windasai¹⁾, Mohammad Mas'ud Said²⁾ & Hayat³⁾****^{1,2,3}Program studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia****Email: [1windasarihatnawi@gmail.com](mailto:windasarihatnawi@gmail.com)****Abstrak**

This study aims to determine the role of local government in empowering fishing communities, as well as the factors that support and influence it. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to the type of case study research. Qualitative descriptive research method is research that is used to describe events or phenomena that occur. Data collection in this study used observation, interviews and documentation techniques. The results of this study are related to the role of local governments in empowering fishing communities, namely organizing fishing community empowerment programs such as increasing human resources, developing facilities and infrastructure and establishing fishermen's institutions. However, in community, there are still several obstacles, such as the lack of human resources at the Sumenep Regency Fisheries Service, limited budget, lack of adequate technology and transportation. This causes the empowerment of fishing communities to be less than optimal.

Keywords: Government Role, Empowerment & Fishermen**PENDAHULUAN**

Nelayan merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang identik dengan masyarakatnya yang hidup di daerah pesisir dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan. Nelayan juga merupakan orang yang mata pencariannya menangkap ikan. Dari banyaknya masyarakat nelayan di Indonesia menangkap ikan dengan menggunakan bantuan kapal tradisional dengan alat sederhana untuk mendapatkan ikan tanpa merusak ekosistem alam. Menurut Marta dan Andry (2020:55) nelayan merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di pesisir dan sangat bergantung pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk kehidupannya. Sumberdaya tersebut meliputi hewan, tumbuhan, serta lahan yang dapat digunakan langsung maupun dilakukan upaya pembudidayaan. Selama ini nelayan memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat di pesisir dan pedesaan.

Pemerintah merupakan unsur negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Maka dari itu diperlukannya pemberdayaan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang optimal dan merata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberi keluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kehususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arah pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia.

Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dengan sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang lebih spesifik ditingkat daerah dalam bentuk produk hukum seperti Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan.

Secara faktual kawasan di Kepulauan Masalembu di dominasi oleh masyarakat nelayan dengan klasifikasi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik kapal, dengan sarana penangkapan yang kurang memadai dan akses penangkapan yang jauh. Hal ini sangat mempengaruhi hasil tangkap dan secara langsung turut berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, disisi lain beberapa nelayan memiliki sarana alat tangkap yang masih terbatas sehingga perlu adanya

perbaruan. Permasalahan yang dihadapi nelayan di Kepulauan Masalembu, antara lain ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, penangkapan ikan berlebihan, perubahan iklim dan cuaca, serta tingginya gelombang laut. atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu diperlukannya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, termasuk keluarga nelayan yang melakukan pengelolaan dan pemasaran. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan, perlu adanya peran pemerintah daerah untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat nelayan tersebut.

Permasalahan lain juga terjadi seperti halnya Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di kepulauan masalembu juga kurang maksimal seperti kurangnya pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bukan hanya itu pemerintah daerah juga kurang dalam memfasilitasi para nelayan, seperti halnya dalam pembinaan dan mencari mitra usaha yang tepat bagi nelayan, serata kurangnya dukungan kemudahan akses informasi dan teknologi yang sulit untuk didapatkan oleh nelayan. Hal lain juga dirasakan masyarakat nelayan kepulauan masalembu seperti kurangnya perhatian dari pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap program-program kepada masyarakat nelayan dan seluruh pemangku kepentingan. khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Melalui kegiatan sosialisasi yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan informasi bagi nelayan yang berdampak pada peningkatan produktifitas hasil perikanan dan kelautan.

Saat ini regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan di Kepulauan Masalembu belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah daerah hanya berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomer 7

Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan, dan petabak garam, serta peraturan pemerintah Nomer 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil. Sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Masyarakat nelayan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengambil judul “ Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan”(Studi kasus Kepulauan Masalembu Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep?
2. Apa saja faktor yang pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep?

LANDASAN TEORI

Teori Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Dalam menjalankan peranannya setiap manusia memiliki sikap atau tindakan yang berbeda-beda. Menurut Poerwadarminta, (Cahya,2017:22) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.

Menurut Riyadi (Syaron, 2017:2) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan

orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, tanggung jawab, tabu dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peran.

Dari pengertian-pengertian diatas peran merupakan sikap atau tindakan seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat yang diharapkan oleh banyak orang atau lingkungannya. jika peran dikaitkan dengan peran pemerintah daerah yaitu peran pemerintah daerah dalam melakukan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran.

Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah yang dikutip dari bukunya Jum anggraini (2012:14) pemerintah berasal dari bahasa Yunani dari kata “cratein”. Dalam bahasa inggris, istilah pemerintah disebut dengan :Government, yang berasal dari bahasa latin: Gubernaculun yang artinya kemudi. Arti Gubernaculun ini di Indonesia diartikan sebagai pemerintah atau pemerintahan. Sedangkan secara etimologi pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa inggris disebut *goverement* yang berasal dari bahasa latin *gubernare*, *greek kybernan* yang berarti mengemudi atau mengendalikan.

Menurut Van Poelje Jum Anggraini (2012:14) yang di namakan pemerintah dalam arti luas adalah fungsi yang meliputi tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah (administrasi). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit merupakan organ/badan/alat

perlengkapan negara yang disertai pemerintahan ataupun tugas-tugas memerintah.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Pemerintah juga diartikan sebagai kelompok orang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta peningkatan daya saing daerah¹. dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan ke khususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Inu Kencana Safiie (Kuswandi, 2017:17) dalam bukunya menjelaskan asas tersebut adalah:

1. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya². sendiri.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (miasalnya, wilayah provinsi).
3. Tugas Pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat.

Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah diposisikan dalam kegiatan manajemen yang memberikan³ informasi, pengetahuan serta pendidikan tentang pengelolaan perikanan. Harapannya dalam kelembagaan yang terbentuk untuk mendorong modal sosial nelayan sehingga

lebih memiliki kekuatan secara sosial dengan ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang lebih mandiri.

Menurut Soerjono Soekanto (Ismail,2017:9), peran merupakan seperangkat perilaku yang seharusnya dimili oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah salah satu elemen negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam mengatur roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara.

Menurut arif (Muhardi, dkk, 2014:69) Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebai regulator, pemerintah member acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiapkegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.

Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu mengerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam

mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebaai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan amantermasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

4. Pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat penembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Totok dan Poerwoko (2012:27), istilah pemberdayaan juga dikatakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya serta aktivitas sosialnya.

Menurut Ambar Teguh (Azhim, Afifuddin & Hayat, 2019:13) pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya,2. atau proses pemeberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan merupakan suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Berdasarkan uraian diatas pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah3. serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan untuk keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi maupun

sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan sebutan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang bermukim diwilayah pesisir dengan aktivitas mengesplotasi, mengelola, dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan perairan yang bersifat milik semua orang sebagai poros tumpu kehidupan sangat ditentungan oleh musim, rentan terhadap degradasi ekosistem, dan gejolak sosial ekonomi.

Adapun penggolongan masyarakat nelayan dalam beberapa kelompok (Zainal,2018:92):

Nelayan tangkap, merupakan kelompok masyarakat pesisir yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dapat dibedakan dar jenis kapal atau peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapnya.

Nelayan pengumpul atau masyarakat bakul, merupakan kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisi ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawa kepasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

Nelayan buruh, yang merupakan kelompok nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri-ciri mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh atau anak buah kapal pada kapal kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

4. Nelayan tambak, merupakan masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat buruh.

Berdasarkan uraian tersebut nelayan dapat dikatakan orang atau komunitas orang yang hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Nelayan juga terbagi beberapa kelompok seperti, nelayan tangkap, nelayan pengumpul, nelayan buruh dan nelayan tambak.

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

pemberdayaan masyarakat adalah1. upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Nixson (,2015:272). Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha dasar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang2. mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan1. sosial yang bersifat keberlanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) mereka dalam membangun kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan.

Menurut Soeharto (Farah, 2019:145), dalam pemberdayaan masyarakat nelayan harus dengan jalan pemberian bantuan kebutuhan hidup, bukanlah upaya memecahkan masalah, namun hanyalah bantuan sementara. Pemberdayaan memerlukan sentuhan teknologi karena pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah perubahan sosial untuk memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan suasana sosial budaya dan sosial ekonomi yang ada.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan upaya untuk

mensejahterakan masyarakat nelayan dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah observasi dan wawancara yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin variable-variabel yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Dalam kehidupan setiap manusia memiliki peran masing-masing dalam kehidupannya. Dimana menurut Poerwadarminta, (Cahya,2017:22) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat. Begitu juga pemerintah dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. dimana menurut Van Poelje Jum Anggraini (2012:14) yang di namakan pemerintah dalam arti luas adalah fungsi yang meliputi tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintah untuk mencapai

tujuan pemerintah (administrasi). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit merupakan organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan ataupun tugas-tugas memerintah.

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada hasil laut, baik dalam mencari nafkah maupun pekerjaannya. Berdasarkan data yang di dapat, Kepulauan Masalembu merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Masyarakat di Kepulauan Masalembu mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan.

peran pemerintah disini sangat di butuhkan di mana menurut arif (Muhardi, dkk., 2014:69) Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi empat peran yaitu yang pertama peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Pertama, pemerintah sebagai regulator, pemerintah member acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

Kedua, Pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

Ketiga, pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berusaha

menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

Keempat, pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat penembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Sudah ada upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan meskipun manfaat dan hasil belum maksimal. Adapun program pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh pemerintah seperti halnya. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pada sektor perikanan merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan pembangunan dalam perikanan. Pengembangan sumberdaya manusia dalam sektor perikanan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, dimana pengembangan sumberdaya manusia tersebut berupa pemberian pembinaan dan pelatihan.

Sejauh ini peran pemerintah telah berupaya dalam melakukan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk pelatihan dan pembinaan, namun untuk Kepulauan Masalembu sendiri pemerintah tidak dapat mengoptimalkan program tersebut dimana menurut Faisal dalam wawancara mengatakan untuk pembinaan dan pelatihan dari pemerintah untuk Kepulauan Masalembu belum ada pemberian pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat nelayan yang ada di Kepulauan Masalembu ini.

Dalam hal ini pemerintah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep sebelumnya telah menegaskan dan membenarkan hal tersebut bahwa pemerintah menyadari ketidak tersealisasinya pemberdayaan dalam program pelatihan dan pembinaan dikarekan ada beberapa kendala sehingga program tersebut tidak terlaksana. Seperti yang dikatakan Agus Indro Wiyono dalam wawancara, bahwa Untuk pelatihan dan pembinaan itu pasti ada namun jika anggaran yang di dapat terlalu kecil kita

sulit sekali mengikut sertakan teman-teman atau kelompok nelayan dari kepulauan karna banyak sekali faktor penghambatnya.

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Salah satu peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu pengembangan sarana dan prasarana. Dimana peran pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana berbentuk bantuan.

Dimana peran pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana berbentuk bantuan-bantuan. Menurut Agus Indro Wiyono dalam wawancara mengatakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan berupa hibah bantuan, asuransi nelayan, sehat nelayan (sertifikat atas tanah nelaya) perahu, mesin dan alat tangkap dan lain sebagainya.

Adapun bantuan yang di berikan kepada masyarakat Nelayan di Kepulauan Masalembu:

Tabel 1. Nama KUB dan Jenis Bantuan Tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

No.	Nama KUB	Desa	Jenis Bantuan
1	Pohlahsar Sejahtra	Sukajeruk	Rantai Dingin
2	Pohlahsar Perdana	Masalima	Rantai Dingin
3	Pohlahsar Usaha Bahari	Masalima	Mini Culboox
4	Pohlahsar JFR Bahari	Masalima	Mini Culboox
5	KUB Bahari	Sukajeruk	Mini Culboox

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep 2020 (Dikelola)

Pembentukan Kelembagaan Nelayan

Pembentukan kelembagaan nelayan merukan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat nelayan dalam

pengelolaan sumberdaya perikanan. Pembentukan kelembagaan nelayan juga bertujuan agar mempermudah pemerintah dalam penyuluhan dan pembinaan masyarakat nelayan.

Pembentukan kelembagaan nelayan diantaranya, kelompok usaha bersama (KUB), kelompok pengelola dan pemasaran (POKLAHSAR), kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), pelompok usaha garam rakyat (KUGAR), dan kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN). Berdasarkan hasil penelitian, kelembagaan nelayan di Kepulauan Masalembu terdapat 8 lembaga diantaranya 3 termasuk dalam kelompok pengelolaan dan pemasaran (POKLAHSAR) dan 4 termasuk dalam kelompok usaha bersama (KUB).

Tabel 2. kelompok nelayan di Kepulauan Masalembu

No	Nama Kelompok	Desa	Kecamatan	Bid Usaha	Pemula	Tgl Berlaku	Ket
1.	Usaha Bahari	Masalima	Masalembu	Poklahsar	Pemula	29 Maret 2022	Aktif
2.	Perdana	Masalima	Masalembu	Poklahsar	Pemula	29 Maret 2022	Aktif
3.	Sejahtra	Sukajeruk	Masalembu	Poklahsar	Pemula	29 Maret 2022	Aktif
4.	Sukajeruk Bahari	Sukajeruk	Masalembu	KUB	Pemula	29 Maret 2022	Aktif
5.	Sukajeruk Makmur	Sukajeruk	Masalembu	KUB	Pemula	29 Maret 2022	Aktif
6.	Sukajeruk Raya	Sukajeruk	Masalembu	KUB	Pemula	29 Maret 2022	Aktif
7.	Pelaot Makmur	Sukajeruk	Masalembu	KUB	Pemula	29 Maret 2022	Aktif

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep 2020 (dikelola)

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Menurut Ambar Teguh (Azhim, Afifuddin & Hayat, 2019:13) pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemeberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan merupakan suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat nelayan haruslah dirancang sedemikian rupa agar pemberdayaan itu langsung menyentuh masyarakat nelayan dan harus tepat sasaran. Meskipun program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. dalam pelaksanaan tersebut tidak luput dari fakto-faktor yang

mempengaruhi seperti halnya, faktor penghambat dan pendukung.

a. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Adapun faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu, adanya peningkatan pola pikir masyarakat. Seperti halnya masyarakat Kepulauan Masalembu sudah memiliki inisiatif untuk mengajukan proposal terkait sarana dan prasarana yang mereka butuhkan. Dengan kata lain masyarakat nelayan Kepulauan Masalembu sudah memiliki pola pikir yang lebih maju. Dan adanya anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat nelayan. Maka hal menjadi pendukung terselenggaranya program-program pemberdayaan masyarakat nelayan.

b. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Berbagai program pemberdayaan masyarakat nelayan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat nelayan. Namun untuk daerah Kepulauan Masalembu masih terdapat beberapa hambatan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu adapun faktor-faktor penghambat diantaranya: keterbatasan SDM Dinas Perikanan, terbatasnya anggaran, kurangnya teknologi, transportasi kurang memadai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Sumenep khususnya di bidang perikanan tidak sepenuhnya maksimal dalam segi pemberdayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu yang pertama, pengembangan sumberdaya manusia, dimana dalam hal pengembangan sumberdaya manusia pemerintah melalui pemberian pelatihan dan pembinaan,

untuk Kepulauan Masalembu dalam hal pemberian pelatihan dan pembinaan masih belum terealisasi. Kedua, pengembangan sarana dan prasarana dalam hal ini pemerintah melalui pemberian bantuan, dalam pemberian bantuan masyarakat terlebih dahulu mengajukan proposal. Ketiga pembentukan kelembagaan nelayan dimana kelembagaan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat nelayan dan mempermudah pemerintah dalam mengkoordiner masyarakat nelayan.

2. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu, pertama kurangnya sumberdaya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, sehingga terdapat program yang masih tidak terealisasi di Kepulauan Masalembu. Kedua, terbatasnya anggaran yang diberikan menjadi kendala dalam menjalankan program-program yang telah dirancang. Ketiga, kurangnya teknologi, di Kepulauan Masalembu untuk teknologi masih sangat minim, seperti halnya jaringan internet yang masih tidak ada, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu. Keempat Transportasi, letak geografis Kepulauan Masalembu yang terbilang lumayan jauh dari Kabupaten Sumenep menjadi kendala dimana transportasi yang digunakan menggunakan transportasi laut yang memakan waktu kurang lebih 14 jam dan untuk transportasi kapal yang tidak setiap hari ada, hal ini juga menjadi kendala pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afifuddin, 2015. Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori dan Implementasinya di Era Reformasi. Alfabeta:Bandung
- [2] Anggraini Jum, 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta:Graha Ilmu
- [3] Hayat, 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- [4] Hayat,2018. Kebijakan Publik, Evaluasi, Revormasi, Formulasi. Intrans Publisng:Malang
- [5] Hyat dan Daris Zunaidah,2018. Kemandirian Desa. Cita Intrans Selaras:Malang
- [6] Islamy Syaiful, 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublilsh
- [7] Nurdin Ismail, 2017. Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan. Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books.
- [8] Nurcholis Hanif, 2016. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Universitas Michigan: Gramedia widia sarana indonesai
- [9] Setiawan Irfan, 2020. Handbook Pemerintahan Daerah. Yogyakarta:WR
- [10] Satria Arif, 2010. Ekologi Politik Nelaya. Yogyakarta: Printing Cemerlang
- [11] Totok dan Poerwoko, 2012. pemberdayaan masyarakat dalam persepektif kebijakan publik. Bandung:Alfabeta.
- [12] Widian Marta, Andry Novrianto.2020. Perubahan Provesi Masyarakat Nelayan di Era 5.0.Sumatra Barat:Insan Cendekia Mandiri
- [13] Alfiyan Yosi Muhamad, Afifuddin, Hayat, 2019. Peranan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Jurnal Respon Publik. Vol. 13, No.5.
- [14] Fauzza Noor Silvana, 2017. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Meningkatkan Prekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Masyarakat Minapolitan. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- [15] Hayat, Slamet Hidayat Turohman dan Yaqub Cikusin, 2018. Strategi Pembangunan Sumberdaya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Transformasi Administrasi. Volume 08.Nomer 02.
- [16] Imanuel Cristian Florentinus.2015. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- [17] Kandra Rian. 2018. Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kolewali Kabupaten Polewali Mandar. Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
- [18] Kuswandi. 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takala. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.
- [19] Maulana Firman, Mohammad Mas'ud dan Hayat. 2021. Pengaruh Kinerja Organisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Oada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Indonesia
- [20] Nugroho Wawan. 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- [21] Nurdin Muh. 2014. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [22] Puenama Sari Titing . 2020. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Guna Meningkatkan Ekonomi di Dusun Lauwo Pantai

-
- Kecamatan Barau Kabupaten Luwu Timur. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Polopo.
- [23] Rahmi. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Banteng. Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negri Alauddin.
- [24] Rohmanu Azhim, Afifuddin dan Hayat, 2019. Pemberdayaan Suatu Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Dalam Penanggulangan Bencana. Jurnal Respon Publik. Vol.13, No.6.
- [25] Ronasifah Firohadin, Nurul Umiati, dan Hayat, 2019. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan dalam Pemberdayaan Lingkungan. Jurnal Respon Publik. Volume 13, No.3.
- [26] Sahyana Yana. 2017. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Transformasi. Manajemen Pemerintahan. Vol.9 No.2.
- [27] Sakinah Aziah.2017. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Trasisional Studikasuk di Desa Pengembangan Jebrana Bali. Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang.
- [28] Syafriani Ida, 2017. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Community Based Management. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wiraraja Sumenep

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN